

## Inklusivitas Politik Etnis Minoritas Di PdiP Kota Makassar: Analisis Rekrutmen Dan Representasi Politik

### *Political Inclusivity of Ethnic Minorities in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) Makassar City: An Analysis of Political Recruitment and Representation*

Muhammad Alif Fauzan Syah<sup>1</sup>, Gustiana Kambo<sup>2</sup>, Muhammad Imran<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Bachelor Program of Political Science, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

<sup>2,3</sup> Department of Political Science, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Correspondent Author: fauzanfahyuddin888@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Political inclusivity; Ethnic minorities; Political recruitment; Political representation; Local politics</i></p>	<p><i>This study analyses the involvement of ethnic minorities within the structure and political activities of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in Makassar and examines the extent to which this nationalist party practices inclusive politics at the local level. A qualitative case study approach was employed to explore the dynamics of political representation in a multiethnic society. Data were collected through in-depth interviews with party officials, minority cadres, and community leaders, complemented by participatory observation and document analysis. The findings reveal that ethnic minority participation in PDIP Makassar is largely descriptive and symbolic, driven more by electoral strategy than by a genuine ideological commitment to pluralism. Nevertheless, minority cadres contribute to shaping the party's image as an open nationalist institution and help expand its political base in multiethnic regions. These results reinforce Pitkin's (1967) theory that substantive representation does not automatically arise from descriptive representation. Practically, this study highlights the need for more transparent recruitment mechanisms and inclusive internal policies to ensure that minority participation becomes equitable and sustainable within party structures and political decision-making processes.</i></p>

<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><i>Inklusivitas politik; Etnis minoritas; Rekrutmen politik; Representasi politik; Politik lokal</i></p> <p><b>How to cite :</b></p> <p><b>DOI:</b> 10.63280/xxxxxx</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan etnis minoritas dalam struktur dan aktivitas politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Makassar serta menilai sejauh mana partai nasionalis ini mempraktikkan politik inklusif di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika representasi politik dalam konteks masyarakat multietnis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai, kader dari kelompok minoritas, dan tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi partisipatif dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan etnis minoritas di PDIP Makassar terutama bersifat deskriptif dan simbolik, yang lebih banyak dimotivasi oleh strategi elektoral ketimbang komitmen ideologis terhadap pluralisme. Meski demikian, keberadaan kader minoritas memberi kontribusi terhadap citra partai sebagai institusi nasionalis yang terbuka dan memperluas basis dukungan politik di daerah multietnis. Temuan ini memperkuat teori representasi politik Pitkin (1967) bahwa representasi substantif tidak selalu otomatis muncul dari representasi deskriptif. Implikasi praktis penelitian ini menekankan perlunya mekanisme kaderisasi dan kebijakan internal yang lebih terbuka untuk memastikan keterlibatan minoritas berlangsung secara setara dan berkelanjutan dalam struktur partai dan pengambilan keputusan politik.</p> <p style="text-align: right;">Copyright © 2025 JPSD. All rights reserved.</p>
--	---

## 1. Pendahuluan

Kajian tentang politik etnis minoritas menduduki posisi penting dalam wacana politik kontemporer, baik dalam konteks global maupun nasional. Di berbagai negara Asia dan Afrika, persoalan etnisitas telah lama menjadi elemen yang menentukan dalam dinamika kekuasaan, pembentukan partai, dan proses representasi politik. Etnisitas bukan hanya identitas kultural, tetapi juga sumber kekuasaan politik dan sarana mobilisasi elektoral. Di Asia Selatan, misalnya, etnis politik di India telah berperan besar dalam mengonstruksi perilaku partai-partai besar seperti Congress Party dan Bharatiya Janata Party (Chandra, 2004). Sementara itu, di Afrika, politik etnis menjadi faktor dominan dalam pembentukan kekuasaan di Kenya, Nigeria, dan Ghana, di mana elit politik sering memanfaatkan loyalitas etnis untuk mempertahankan pengaruhnya (Posner, 2005; Horowitz, 1985).

Fenomena serupa juga ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis. Dalam konteks demokrasi pascareformasi, etnisitas memainkan peran baru dalam politik elektoral. Reformasi politik 1998 membuka ruang bagi desentralisasi kekuasaan dan memperluas

partisipasi politik lokal, termasuk bagi kelompok etnis minoritas yang sebelumnya termarjinalkan. Kondisi ini menjadikan etnisitas sebagai salah satu modal sosial politik yang relevan dalam arena kompetisi elektoral (Aspinall, 2011; Bertrand, 2004). Dalam praktiknya, partai-partai nasionalis yang sebelumnya menolak politik identitas kini harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa keterwakilan etnis memiliki nilai elektoral yang signifikan di tingkat lokal.

Secara nasional, keterlibatan etnis minoritas dalam politik Indonesia masih menyimpan paradoks. Di satu sisi, konstitusi menjamin kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi etnis. Namun, di sisi lain, sejarah politik Indonesia menunjukkan pola eksklusif terhadap kelompok minoritas, terutama etnis Tionghoa dan kelompok etnis non-dominan di wilayah tertentu (Hoon, 2010). Selama Orde Baru, representasi politik minoritas sangat terbatas akibat kebijakan asimilasi dan pembatasan ekspresi etnis. Reformasi 1998 membuka kembali ruang bagi keterlibatan politik minoritas, tetapi inklusivitas yang dihasilkan belum merata. Penelitian Haris (2016) menunjukkan bahwa partai nasionalis seperti PDIP, Golkar, dan NasDem mulai menampilkan figur minoritas di level lokal sebagai simbol pluralisme, namun peran substantif mereka dalam pengambilan keputusan partai masih terbatas.

Di Makassar, politik etnis memiliki karakter yang khas. Kota ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, serta minoritas Tionghoa dan etnis pendatang lainnya. Dalam konteks ini, PDIP sebagai partai nasionalis berupaya membangun basis dukungan yang inklusif. Namun, upaya tersebut berjalan di tengah struktur sosial yang masih diwarnai dominasi etnis lokal. Penelitian Neilson (2014) dan Erb & Sulistiyanto (2009) menunjukkan bahwa di Indonesia Timur, identitas etnis sering menjadi modal simbolik dalam politik lokal, meskipun partai nasionalis berupaya menampilkan diri sebagai partai lintas identitas.

Pentingnya penelitian ini terletak pada dua alasan utama. Pertama, secara teoretis, studi tentang representasi politik minoritas di partai nasionalis masih jarang dilakukan, terutama di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian tentang politik identitas di Indonesia berfokus pada dinamika politik etnis di daerah dengan mayoritas homogen atau pada partai berbasis agama dan etnis, seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau Partai Persatuan Pembangunan (Haryanto, 2015; Mujani, 2018). Kajian tentang bagaimana partai nasionalis seperti PDIP mengelola inklusivitas etnis minoritas di tingkat lokal masih minim. Kedua, secara empiris, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana ideologi nasionalisme PDIP diterjemahkan dalam konteks sosial yang multietnis seperti Makassar, di mana representasi etnis minoritas bukan hanya soal simbol, tetapi juga strategi politik dan bentuk negosiasi identitas.

Dari segi metodologis, studi ini mengisi celah penelitian (research gap) dalam dua hal utama. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu mengenai PDIP banyak menyoroti ideologi nasionalisme dan pelemagaan partai (Ufen, 2006; Mietzner, 2013), tetapi belum membahas secara mendalam bagaimana ideologi tersebut berinteraksi dengan politik identitas di tingkat lokal. Kedua, penelitian tentang politik minoritas di Indonesia lebih sering berfokus pada dimensi konflik atau diskriminasi, bukan pada aspek integrasi dan representasi dalam struktur partai

(Setiawan et al., 2015). Penelitian ini berupaya memperluas perspektif tersebut dengan melihat bagaimana kelompok etnis minoritas diakomodasi dalam sistem rekrutmen, penempatan kader, dan peran elektoral di tubuh PDIP Makassar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keterlibatan etnis minoritas, tetapi juga menilai sejauh mana inklusivitas partai nasionalis diwujudkan secara praksis di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur tentang demokrasi inklusif dan representasi politik di negara-negara multietnis. Seperti yang dikemukakan oleh Lijphart (1999), stabilitas demokrasi di masyarakat plural tergantung pada kemampuan institusi politik mengakomodasi perbedaan identitas. Dalam konteks Indonesia, PDIP sebagai partai besar dengan ideologi nasionalisme Pancasila diharapkan menjadi pelopor politik yang tidak diskriminatif. Namun, literatur empiris menunjukkan bahwa meskipun partai nasionalis sering mengklaim representasi universal, dalam praktiknya mereka cenderung mereproduksi dominasi etnis mayoritas dalam struktur organisasinya (Tapsell, 2017). Oleh karena itu, analisis terhadap PDIP Makassar dapat memberikan gambaran apakah partai nasionalis benar-benar mampu mempraktikkan inklusivitas di tingkat lokal atau hanya menggunakan simbolisme pluralisme untuk kepentingan elektoral.

Konteks politik Makassar juga memberikan dimensi penting bagi analisis ini. Sebagai kota metropolitan yang merepresentasikan heterogenitas etnis dan sejarah panjang perdagangan antaretnis, Makassar menjadi laboratorium sosial yang ideal untuk menguji sejauh mana partai nasionalis seperti PDIP dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai ideologis dan kepentingan pragmatis politik identitas. Dalam situasi di mana keterwakilan etnis minoritas sering kali hanya sebatas representasi simbolik, penelitian ini mencoba memahami bagaimana proses politik di PDIP Makassar memberi ruang bagi partisipasi nyata kelompok minoritas dalam struktur partai dan pengambilan keputusan politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menawarkan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk dan dinamika keterlibatan etnis minoritas dalam struktur dan kegiatan politik PDIP di Kota Makassar? Kedua, sejauh mana keberadaan etnis minoritas dalam PDIP mencerminkan praktik politik inklusif dan representasi substantif di tingkat lokal? Pertanyaan ini penting untuk menjelaskan apakah partai nasionalis seperti PDIP benar-benar menjadi wadah politik yang egaliter atau sekadar menggunakan keragaman etnis sebagai strategi simbolik untuk memperluas dukungan elektoral.

## **2. Kajian Literatur**

Kajian tentang keterlibatan etnis minoritas dalam partai politik merupakan bagian dari kajian yang lebih luas mengenai representasi politik dan identitas politik dalam masyarakat multikultural. Literatur global dan nasional menampilkan bahwa partisipasi politik minoritas tidak hanya mencakup akses terhadap kekuasaan, tetapi juga representasi simbolik dan substantif yang menentukan sejauh mana demokrasi mampu mengakomodasi kepatuhan sosial. Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi semakin penting setelah era reformasi,

ketika desentralisasi dan demokratisasi membuka ruang bagi munculnya kembali ekspresi politik berbasis etnis dan lokalitas.

Secara kontekstual, teori representasi politik yang dikemukakan oleh Pitkin (1967) menjadi kerangka dasar dalam memahami posisi kelompok minoritas dalam sistem politik. Pitkin membedakan empat bentuk representasi: formal, deskriptif, simbolik, dan substantif. Dalam kerangka ini, partisipasi etnis minoritas dalam partai politik dapat dipahami bukan hanya sebagai kehadiran fisik (representasi deskriptif), tetapi juga sejauh mana kepentingan mereka diperjuangkan dalam proses politik (representasi substantif). Konsep ini relevan untuk membaca bagaimana partai nasionalis seperti PDI Perjuangan mengintegrasikan etnis minoritas ke dalam struktur partai dan strategi politiknya di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian memperkaya pemahaman tentang hubungan antara etnisitas, representasi, dan partai politik di negara-negara demokrasi Asia dan Afrika. Pertama, penelitian Lemarchand dan Niang (2020) di Afrika Barat menyoroti bahwa keterlibatan etnis minoritas dalam partai-partai nasional sering kali bersifat instrumental. Partai menggunakan representasi etnis sebagai strategi elektoral untuk memperluas dukungan, tanpa benar-benar memberikan ruang substantif bagi kelompok tersebut dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa inklusivitas partai bersifat semu, yang menguntungkan elite dominan. Hal serupa muncul dalam konteks Indonesia, di mana partai nasionalis sering menampilkan tokoh minoritas sebagai simbol pluralisme tanpa mengubah struktur kekuasaan internal.

Kedua, studi Pepinsky dan Saiful (2021) tentang politik identitas di Indonesia menemukan bahwa setelah dua dekade, politik berbasis etnis dan agama masih menjadi instrumen penting dalam mobilisasi politik lokal. Mereka menunjukkan bahwa partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar tetap harus beradaptasi dengan konfigurasi sosial lokal yang beragam untuk mempertahankan legitimasi elektoral (ibid). Dalam kasus PDIP, pendekatan nasionalisme Pancasila memungkinkan terjadinya dalam menerima kader dari latar belakang etnis minoritas, namun praktik representasi substantif masih terbatas karena keputusan strategi yang didominasi partai elit pusat. Penelitian ini menegaskan bahwa ideologi nasionalisme tidak serta merta menghasilkan inklusivitas politik yang mendalam.

Ketiga, studi oleh Warburton dan Aspinall (2019) menyoroti munculnya kembali identitas politik di Indonesia pasca Pilkada langsung. Mereka berargumen bahwa politik lokal sering kali menjadi ruang di mana partai nasionalis bernegosiasi dengan identitas etnis dan agama lokal untuk kepentingan elektoral. Dalam konteks ini, politik inklusif kali dipraktikkan secara pragmatis, bukan ideologis. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip universalitas partai nasionalis dan kebutuhan adaptasi lokal. Temuan Warburton dan Aspinall (2019) menampilkan relevansi tinggi bagi studi tentang PDIP Makassar, yang juga beroperasi dalam konteks sosial multietnis dengan struktur kekuasaan lokal yang kuat.

Keempat, penelitian Cahyono dan Rahman (2022) tentang representasi etnis minoritas di partai-partai daerah di Sulawesi Selatan menemukan bahwa kehadiran kader minoritas sering kali berfungsi sebagai representasi simbol tanpa akses signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Mereka menekankan bahwa struktur hierarkis partai dan orientasi elektoral menyebabkan inklusivitas partai tidak berjalan pada tataran substantif. Studi ini menunjukkan bahwa strategi politik partai nasionalis di daerah cenderung mengakomodasi minoritas untuk kepentingan pencitraan politik dan perluasan dukungan, bukan karena komitmen ideologis terhadap pluralisme.

Semua kajian terdahulu tersebut memberikan konteks empiris yang luas bagi penelitian tentang PDIP Makassar. Namun, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan (research gap) yang belum tercapai oleh studi-studi sebelumnya. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada representasi etnis minoritas di tingkat nasional atau provinsi (Taufiq & Taufiq, 2013). Sementara dinamika di tingkat lokal, khususnya Makassar yang memiliki kompleksitas etnis tinggi, masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, kota seperti Makassar menjadi arena penting bagi interaksi antara ideologi partai nasional dan realitas sosial lokal. Kedua, sebagian besar penelitian tentang PDIP menyoroti aspek kelembagaan, partai pelebagaan, atau ideologisme nasional (Mietzner, 2013; Ufen, 2006), tetapi belum membahas bagaimana ideologi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik inklusivitas etnis di lapangan.

Ketiga, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan makro atau kuantitatif yang menggambarkan kecenderungan umum, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap dinamika internal partai di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana partai nasionalis menegosiasikan representasi etnis minoritas dalam praktik politik sehari-hari. Keempat, sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan minoritas sebagai objek representasi pasif, sementara penelitian ini berusaha melihat mereka sebagai agen politik yang memiliki peran dan strategi dalam struktur partai.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan dimensi baru dalam literatur tentang demokrasi inklusif di Indonesia. Mengacu pada teori Lijphart (1999) tentang demokrasi asosiasional, keterlibatan minoritas dalam lembaga politik tidak hanya menjadi simbol keberagaman, tetapi juga mekanisme penting untuk menjaga stabilitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan kuncinya adalah apakah partai nasionalis mampu menyeimbangkan antara prinsip ideologi Pancasila yang universal dan praktik politik lokal yang berorientasi pada identitas.

Secara teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada perkembangan konsep representasi inklusif dalam studi politik komparatif. Inklusivitas politik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan minoritas dalam partai, tetapi juga oleh sejauh mana partai menyediakan ruang deliberatif dan mekanisme institusional bagi mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Hal serupa dijelaskan oleh Celis dan Lovenduski (2018), representasi substantif mensyaratkan adanya saluran partisipasi

yang memungkinkan kelompok minoritas menjadi aktor politik aktif. Dengan demikian, analisis terhadap PDIP Makassar dapat membantu memahami bagaimana representasi kaum minoritas bekerja dalam konteks partai nasionalis di masyarakat multietnis.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika keterlibatan etnis minoritas dalam struktur dan aktivitas politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, motivasi, dan pengalaman subjektif aktor politik dalam konteks sosial tertentu (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus PDIP Makassar dipilih karena partai ini merupakan representasi partai nasionalis yang menampilkan pluralitas etnis di tingkat lokal.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang terdiri atas pengurus partai, kader etnis minoritas, dan tokoh masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas politik PDIP di Makassar. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam dinamika partai. Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami praktik politik dan interaksi antaranggota partai dalam kegiatan organisasi serta kampanye. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dimensi simbolik dan praksis dari inklusivitas partai politik di tingkat lokal (Yin, 2018).

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen internal partai, pemberitaan media lokal, dan laporan penelitian sebelumnya mengenai identitas politik di Indonesia Timur. Semua data dianalisis secara tematik dengan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis proses dilakukan dengan mengidentifikasi representasi pola-pola, rekrutmen strategi, serta bentuk keterlibatan etnis minoritas dalam struktur PDIP. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan hubungan antara ideologi nasionalisme partai dan praktik inklusivitas di tingkat lokal secara kontekstual dan mendalam.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 PDI-P Kota Makassar Dalam Merekrut Pengurus Kader Etnis Minoritas.**

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi ini meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai. Untuk itu partai membutuhkan kader-kader yang kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan struktur partai dan jabatan parlemen yang sempat terpilih. Dengan mempunyai kader-kader yang berkompeten, partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai

peluang untuk dapat mengajukan calon ke bursa kepemimpinan lokal dan nasional.

Selain itu kehadiran partai politik di tataran budaya lokal yang kental dengan budaya nasionalis ini melahirkan partai berideologi nasionalis dan religius yang dapat diterima dalam lingkup budaya lokal

Hal yang penting diperhatikan dalam membentuk partai politik adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi faktor penting dan utama dalam perjalanan partai politik. Partai politik berperan melahirkan kader-kader yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya. Tanpa adanya rekrutmen politik, keberlangsungan partai akan sulit (Cangara, 2009:213). Dalam hal ini partai politik tidak hanya melakukan rekrutmen saja, tetapi harus melakukan pendidikan kaderisasi guna menyiapkan kader yang mampu menjalankan sistem dan membentuk karakteristik pemimpin-pemimpin yang akan datang.

Peran partai politik dalam menyediakan individu untuk mengisi suatu jabatan politik pada tataran legislatif sangat melekat pada sistem rekrutmen politik di PDI-P di Kota Makassar. Partai politik menjadi sarana kunci dalam proses rekrutmen di banyak peluang jabatan politik. Fungsi partai dalam negara demokratis yaitu melaksanakan rekrutmen politik. Partai politik juga sebagai sarana rekrutmen juga berfungsi untuk mencari serta mengajak individu yang dianggap memiliki kemampuan atau kapasitas politik untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dengan cara itu di tempuh oleh PDI-P guna memperluas partisipasi politik serta memastikan proses sirkulasi jabatan politik terus berjalan.

Rekrutmen partai politik menjadi tahapan yang penting, karena pada tahap ini partai politik mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki banyak potensi. Anggota atau kader dalam partai politik menjadi sebuah persoalan selalu membayangi partai politik. Sebagaimana yang diungkapkan sekretaris Bapilu bapak Raisuljaiz, S.Ag :

“dalam kepengurusan PDIP kota makasar terdiri dari pengurus dan kader, kalau anggota belum tentu jadi kader sedangkan kader sudah jelas menjadi anggota dalam hal ini semua etnis bisa ikut baik sebagai anggota maupun sebagai kader” (wawancara tanggal 18 maret 2024)

Keberadaan anggota memiliki keuntungan tersendiri bagi partai politik, yaitu: Pertama, anggota partai politik mempunyai legitimasi dan dapat memberikan masukan bahwa partai politik bukan organisasi profesional. Kedua, kader partai dapat mempengaruhi masyarakat. Ketiga, keanggotaan partai dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik (Darmawan, 1999:144).

Anggota partai harus melalui sebuah proses perekrutan yang biasa disebut dengan kaderisasi politik. Kaderisasi politik adalah proses pendidikan berjenjang untuk menanamkan nilai perjuangan partai serta mempersiapkan kader partai sebagai pemimpin partai yang mampu berperan untuk memajukan partai politik. Partai politik dalam menjalankan proses kaderisasi harus memiliki pendidikan

pelatihan yang baik untuk menjadikan kader partai dalam menduduki jabatan-jabatan politik eksekutif maupun legislatif dan meregenerasi kepemimpinan partai selanjutnya.

Partai dengan simbol banteng moncong putih atau yang biasa dikenal dengan Partai PDI Perjuangan merupakan salah satu partai di Indonesia yang mempunyai eksistensi yang cukup bagus. Sebagai salah satu partai kader, PDI Perjuangan juga mempunyai mobilisasi yang baik terhadap semua kalangan. Di kota Makassar partai PDIP dapat dikatakan sebagai partai besar di Indonesia.

PDI-P merupakan partai yang dideskripsikan sebagai nationalist. Dalam perekrutan pengurus di DPC PDI-P kota Makassar dimana PDI-P sebagai partai nasionalis tentunya terbuka bagi semua pihak baik dari berbagai kelompok, ras, suku, etnis, dan agama. Dengan hasil wawancara informan ketua umum, Ibu Ir.HJ Andi Suhada Sappaile :

“Keberadaan kepengurusan PDI-P Kota Makassar yang terkesan memiliki berbagai etnis. Dimana di dalam kepengurusan PDI-P Kota Makassar Etnis yang tergolong mayoritas yaitu Bugis dan Makassar, sedangkan Etnis yang tergolong minoritas yaitu: Toraja, Manado, Cina. “ (wawancara Tanggal 13 Maret 2024)

PDI-P Kota Makassar, berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam structural partai, Lembaga-lembaga politik, maupun Lembaga-lembaga publik. Partai juga mempunyai kewajiban untuk membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran ideologi nasionalis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PDI-P Kota Makassar memiliki sistem untuk mempromosikan kader-kadernya yang paling mampu agar bisa memperjuangkan pekerjaan sebagai anggota parlemen. Kriteria yang dipersyaratkan oleh partai dalam hal tertentu keinginan konstituen atau public, biasanya menjadi pertimbangan dalam menentukan rekrutmen. Secara umum dan teori, kriteria yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik selalu terkait dengan ideologi kader, loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan Politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial ekonomi Pendidikan, dll), dan hubungannya dengan konstituen dan pemilu.

Dengan kata lain, kriteria selalu terkait dengan ideologi kader loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan Politik. Ciri-ciri tersebut merupakan cerminan dari tuntutan partai dari satu pihak dan tanggung jawab partai di pihak lain untuk mendukung terciptanya wakil rakyat dan pejabat publik yang berintegritas, jujur, akuntabel, dan tidak korup, masing-masing.

Dengan melihat konsep etnis minoritas, yang mengacu pada kelompok sosial yang berbeda dari kelompok dominan atau mayoritas dalam partai. PDI-P Kota Makassar menginginkan untuk mengembangkan sebuah komunitas yang lebih diversitas dan inklusif. Representasi dan dan inklusivitas juga memainkan peran penting dalam memotivasi kelompok etnis minoritas di PDI-P mendorong inklusivitas dan menginspirasi kader atau pengurus lainnya lainnya untuk berpartisipasi, karena mereka dapat berhubungan dan merasa terwakili oleh mereka yang memiliki pengalaman dan aspirasi yang sama. Selanjutnya, relevansi kebijakan, PDI-P merupakan faktor penting dalam merangsang partisipasi politik pemuda. Ketika isu-isu politik yang menjadi jalan perjuangan PDI-P berdampak langsung kepada kehidupan kaum muda, seperti Pendidikan politik dan lingkungan Masyarakat setempat. Hal itu memotivasi mereka untuk secara aktif terlibat dan mengadvokasi perubahan.

Dengan merekrut pengurus yang berasal dari etnis minoritas adalah langkah yang dapat memperkuat hubungan dan percayaan antara kelompok minoritas dan kelompok dominan tentu memiliki alasan mengapa PDI-P Kota Makassar merekrut beberapa pengurus yang teridentifikasi sebagai etnis minoritas di Kota Makassar. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh wakil ketua Bidang Pemenengan Pemilu, Bapak Raisuljaiz, S.Ag :

“Pada dasarnya pengurus PDI-P Kota Makassar Tidak Melihat pada Etnisitas, siapa saja yang mau Bergabung ke pengurus atau kader PDI-P, diperkenankan dengan tidak melihat Etnis atau agama yang penting loyalitas terhadap partai, olehnya itu pengurus dan kader dari berbagai macam etnis yang ada” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2024).

Dalam perekrutan pengurus ke dalam DPC PDI-P Kota Makassar, dalam mendukung terciptanya wakil rakyat dan pejabat publik menjadi komponen penting dalam mengumpulkan informasi, membantu dalam pengembangan program, serta membantu dalam mengumpulkan dukungan dari masyarakat, berdasarkan hasil wawancara informan Bendahara DPC PDI-P Kota Makassar oleh Ibu Andi Nabila, SH :

“Selama beberapa periode ini, caleg PDI-P kota makassar berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Bahkan anggota DPRD Kota Makassar terpilih pada periode 2019-2024 berasal dari etnis Toraja, dan Cina Tionghoa.”

Tabel 1.  
Daftar Nama dan Jabatan Pengurus  
Etnis Minoritas PDIP Kota Makassar

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Etnis</b>
Anton Paul Goni	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Manado
William, SE	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Toraja
Mesakh R. Rantepadang, SH	Sekretaris	Toraja

Sumber: DPC PDIP Kota Makassar

Berdasarkan daftar nama pengurus yang teridentifikasi etnis Minoritas, ada tiga pengurus yang terpilih menjadi Anggota dewan di pemilu 2024 Di Kota Makassar, yaitu Galmerrya Kondorura yang berasal dari Etnis Toraja, Mesakh Raymond Rantepadang yang berasal dari etnis Toraja dan William, S.E yang berasal dari etnis Cina/Tionghoa. Hal ini dapat dilihat bahwa etnis minoritas di Kota Makassar juga dapat memenangkan kursi di parlemen dimana kita ketahui pemilu 2024 di Kota Makassar tergolong didominasi calon yang berasal dari etnis mayoritas.

Hal ini mengungkapkan, alasan mengapa PDI-P Kota Makassar merekrut pengurus yang berasal dari Etnis minoritas. Sehingga mereka memiliki power dalam meraih suara pemilih mayoritas di pemilihan umum dan bahkan terpilih di Pemilu Kota Makassar 2024. Dalam hal ini Dalam pemilihan umum, partai politik akan menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Mereka akan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan wakil rakyat dan pejabat publik, yang dapat diperoleh melalui pendukung masyarakat, partai politik, korporasi dan organisasi, serta media dan persyaratan publik. Berdasarkan hasil wawancara wawancara informan ketua umum, Ibu Ir. HJ Andi Suhada Sappaile:

“Sebagaimana yang kami ungkapan, bahwa PDI-P kota makassar tidak memandang Etnis dan agama, namun setelah merekrut peengurus dan kader terlihat ada kategori yang minoritas seperti cina, manado, dan toraja, bahkan mereka terpilih dalam pileg 2024”. (Wawancara Tanggal 13 Maret 2024).

#### 4.2 PDI-P Kota Makassar dalam menempatkan Kader Etnis Minoritas ke dalam Struktur Kepartaian

Pengaruh etnis di dalam kepengurusan di partai politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan keputusan kader partai. Etnis adalah faktor yang mengarahkan kepada perilaku, perasaan, dan perilaku yang terkait dengan identitas etnis. Pengaruh etnis dapat mempengaruhi kepengurusan di partai politik melalui berbagai cara, seperti perbedaan pendapat, perilaku, dan prioritas.

Etnis dapat mempengaruhi kepengurusan di partai politik melalui perbedaan pendapat dan prioritas. Misalnya, kader partai dari etnis yang berbeda mungkin memiliki perbedaan pendapat terhadap tata cara dan strategi partai. Etnis dapat juga mempengaruhi prioritas kader partai, seperti prioritas terhadap kepentingan etnis maupun prioritas terhadap kepentingan partai.

Dalam kepengurusan di DPC PDI-P Kota Makassar kekuatan Etnis PDI-P kota Makassar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepengurusan di partai politik. Mereka memiliki peranan penting dalam membangun dan mengatur kepengurusan partai, serta mengikuti tata cara dan strategi yang ditetapkan oleh PDI-P Kota Makassar. Berdasarkan ungkapkan oleh wakil ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Bapak Raisuljaiz, S. Ag:

“PDI-P ini adalah Partai Nasionalis: dan Partai terbuka, sehingga siapapun bisa masuk menjadi anggota atau kader. Tetapi dengan melihat konsep etnis, hampir semua Struktur kepengurusan yang ada di PDI-P Kota Makassar ini, semua etnis ada seperti Bugis, Makassar, Toraja, cina/Tionghoa, Manado. Tetap pada prinsipnya, kita tidak melihat itu. Tetapi dalam kepengurusan semua komponen kita libatkan.”(Wawancara Tanggal 18 Maret 2024).

Kehadiran Etnis Minoritas dalam konstestasi politik di Kota Makassar, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pileg di daerah semakin terbuka dan berpeluang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Etnis Minoritas telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Kota Makassar Khususnya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fenomena ini merupakan kecenderungan yang terus menguat. Sebagai hasil terus menguatnya gerakan dan tuntutan serta meluasnya kesadaran tentang kekuatan Etnis dalam meraih suara khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (PILEG). Ruang dan jabatan politik kian terbuka bagi siapa saja. Tidak lagi diperuntukkan secara eksklusif bagi etnis tertentu dan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat Etnis.

Pengurus partai yang teridentifikasi etnis minoritas dapat membantu meningkatkan kemampuan politik dalam partai politik. Hal ini dapat membantu membentuk partai politik yang lebih efektif dan mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas. Dalam memperkuat toleransi dan percayaan, Pengurus Partai yang teridentifikasi etnis minoritas dapat membantu memperkuat toleransi dan percayaan antar kelompok dalam partai politik. Hal ini dapat membantu

membentuk partai politik yang lebih toleran dan mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Milbraith (1965) yang mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong adanya orang berpartisipasi dalam suatu politik. Pertama, adanya perangsang, maka orang akan berpartisipasi dalam politik. Misal: keikutsertaan dalam mengikuti diskusi formal maupun berita di mass media. Kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang memiliki watak sosial, akan lebih memiliki kepedulian besar dalam problem sosial, ekonomi, politik. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut masalah status ekonomi, kelompok ras, kelompok etnis dan agama seseorang. Lingkungan sosial itu akan mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang dari lingkungan sosial akan lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif akan membuat orang mau terlibat dalam politik.

Selain faktor-faktor diatas, ada faktor-faktor lain adalah syarat legal formal suatu system pemilihan, sifat dari system partai politik, dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Dari data temuan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya keterlibatan elit partai etnis minoritas di PDI-P maupun ada beberapa faktor. Terdapat empat faktor besar yang melatarbelakangi elit partai etnis minoritas. Pertama, latar belakang etnis minoritas itu sendiri, kedua, figure pemimpin partai. Faktor ketiga adalah citra ideologis dan keempat, peran dari keluarga. Hal ini yang melatarbelakangi mereka memilih suatu partai politik tersebut dalam sikap politik mereka dalam politik praktis. Selain itu data temuan selanjutnya mengenai adanya elit dinasti yang terdapat di partai politik pada PDI-P kota makassar. Di PDI-P nuansa elit memang terasa, bahkan keberadaan etnis itu sendiri terdapat dinasti dalam struktur PDI-P kota makassar.

Etnis Minoritas berhak dan berpotensi memberikan kontribusi nyata di dalam partai politik. Dalam hal ini, pengurus atau kader etnis minoritas dapat menjadi calon politik untuk posisi seperti ketua, wakil, atau calon legislatif. Hal ini dapat membantu mereka memperkuat kemampuan politik dan membantu mengubah persepsi masyarakat tentang etnis minoritas. Dalam meningkatkan pendudukan komunitas etnis minoritas dapat membentuk pendudukan komunitas yang kuat dan solid. Jika komunitas masyarakat tersebut memiliki pendudukan yang kuat, maka etnis minoritas dapat meraih suara dalam perebutan kursi di parlemen.

Salah satu pengurus dengan etnis Toraja dan juga terpilih sebagai Anggota Dewan dalam pemilihan calon legislatif Kota Makassar 2024 adalah Mesakh R. Rantepadang, S.H. Sebagai informan studi ini menjelaskan bagaimana pengaruh atau kontribusi khusus sebagai pengurus etnis Minoritas di DPC PDI-P Kota Makassar. Menurutnya tidak ada pengaruh khusus kader dengan identitas etnis

minoritas dalam kepengurusan PDI-P Kota Makassar. Mesakh menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan semua punya tujuan yang sama yaitu untuk membesarkan partai dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui politik. Secara detial informan menjelaskan bahwa:

“Saya sudah bertahun-tahun sebagai pengurus di PDI-P Kota Makassar ini, tidak ada di bebani mahar, yang ada itu gotong royong dan kita hanya fokus untuk bergerak untuk mencari suara untuk partai. Dan yang terpilih menjadi Anggota Dewan bagaimana mereka yang terpilih bisa menggunakan materi yang ada untuk kebesaran partai untuk menyentuh Masyarakat dan membantu Masyarakat dan non materi malah lebih banyak, secara tanggung jawab moral terhadap partai bahwa partai sudah membesarkan dan bersama-sama dengan partai, dia menjadi anggota DPR dan dia harus Kembali kepada partai untuk membesarkan partai secara moral dan secara non materil, apalagi di etnis toraja itu untuk PDI-P itu menjadi segmen pemilih tradisional untuk PDI-P Kota Makassar.” (Wawancara Tanggal 15 Maret 2024).

Secara umum, bahwa PDI-P tidak melihat atau tidak mempersoalkan etnisitas. Tapi dengan melihat secara tersuratnya bahwa, etnis minoritas di PDI-P Kota Makassar dapat memberikan peluang dalam meraih suara yang cukup besar dalam hal penempatan kursi, khususnya di di pemilihan calon legislatif. Pada tentunya bahwa etnis minoritas ini tidak semua partai miliki karena PDI-P dianggap sebagai partai yang berideologi nasionalis yang tidak melihat dari perspektif etnis dan agama (Fadiyah, 2017). Dimana dalam jal ini, Partai PDI-P Kota Makassar memiliki 20% pengurus yang teridentifikasi etnis minoritas. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam kepengurusan PDI-P Kota Makassar etnis minoritas tergolong cukup besar. Contohnya pengurus yang berasal dai etnis Cina/Tionghoa yang mencalonkan sebagai Anggota Dewan tentunya dapat mengambil suara pemilih darii etnis Cina/Tionghoa dengan begitu juga Etnis Toraja, mengambil suara pemilih yang berasal dari toraja, dan seterusnya. Maupun di Tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara wawancara informan ketua umum, Ibu Ir. HJ Andi Suhada Sappaile

“Bahkan di kepengurusan PDI-P Kota Makassar di Tingkat kota maupun Tingkat kecamatan ada yang beretnis cina. Misalnya mereka berasal dari penduduk situ Tentunya mereka mampu meraup suara pada etnisnya saat pemilihan umum di dapil masing-masing” (Wawancara Tanggal 13 Maret 2024).

PDI-P Kota Makassar tidak memandang dan memperlakukan khusus bagi keikutsertaan pengurus etnis minoritas dalam kaderisasi partai politik sebagai sebuah formalitas belaka. Bahkan tidak hanya untuk mencari simpati dan dukungan dari etnis minoritas bahwa mereka adalah partai politik yang ramah terhadap keberadaan dan partisipasi. Namun lebih jauh lagi, PDI-P Kota Makassar juga wajib mendorong kader untuk berdaya dan berkarya. Partai politik wajib memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas kader sehingga tidak hanya dipandang sebagai sebuah kuantitas atau sekedar angka keterwakilan tetapi juga

secara kualitas di mana kader yang mereka miliki dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan kinerja partai politik. Dibutuhkan partisipasi yang lebih substantif dan komprehensif dalam upaya membekali kader dalam partai politik untuk lebih memberikan kesadaran dan pemahaman bagi tentang fungsi pada pengembangan pengorganisasian partai politik. Dengan bergabungnya kader etnis minoritas dengan perannya di partai politik akan mendorong partisipasi yang lebih luas dan memberikan potensi dalam meraih suara untuk partai yang lebih tinggi di parlemen.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan etnis minoritas dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Makassar mencerminkan bentuk representasi politik yang kompleks, di mana nilai-nilai nasionalisme dan pluralisme partai berinteraksi dengan realitas sosial lokal yang masih didominasi oleh struktur etnis mayoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kader dari kelompok minoritas dalam struktur partai dan aktivitas politik PDIP di Makassar tidak hanya merupakan simbol inklusivitas, tetapi juga bagian dari strategi elektoral yang disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Meskipun demikian, partisipasi tersebut masih bersifat terbatas pada representasi deskriptif dan belum sepenuhnya mewakili representasi substantif sebagaimana diidealkan dalam teori representasi politik.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana teori representasi politik (Pitkin, 1967) bekerja dalam konteks masyarakat multietnis di negara berkembang. Konsep representasi deskriptif dan substantif dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan lokal dan pihak institusional strategis. Penelitian ini juga memperkuat pandangan Lijphart (1999) bahwa keberhasilan demokrasi dalam masyarakat plural sangat bergantung pada kemampuan partai politik mengakomodasi keberagaman identitas tanpa mengorbankan integrasi nasional. Dalam hal ini, PDIP Makassar menjadi contoh bagaimana partai nasionalis berupaya menyeimbangkan antara universalitas ideologi Pancasila dengan kebutuhan pragmatis politik lokal. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanpa mekanisme internal yang menjamin akses setara bagi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan, inklusivitas pihak berisiko hanya menjadi simbolik dan tidak transformatif.

Dari perspektif politik identitas, penelitian ini menegaskan bahwa partai nasionalis tidak dapat sepenuhnya menghindari etnis politik, tetapi justru harus menegosiasikannya secara adaptif. Keterlibatan etnis minoritas dalam PDIP Makassar menampilkan bentuk kompromi antara aspirasi kesetaraan dan kalkulasi elektoral. Temuan ini menegaskan bahwa representasi politik di tingkat lokal tidak semata-mata ditentukan oleh ideologi partai, melainkan juga oleh jaringan sosial, hubungan patronase, dan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori politik inklusif dengan menyoroti bahwa praktik inklusivitas harus dipahami

sebagai proses yang kontekstual, bukan sebagai atribut tetap dari partai nasionalis.

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan demokrasi dan penguatan partisipasi politik di Indonesia. Pertama, partai politik nasional perlu mengembangkan mekanisme kaderisasi yang lebih terbuka dan berbasis meritokrasi, sehingga representasi etnis minoritas tidak berhenti pada tingkat simbolik, melainkan juga menghasilkan kontribusi substantif dalam kebijakan partai. Kedua, pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi partisipasi semua kelompok etnis, melalui pendidikan politik, transparansi proses politik, dan jaminan kesetaraan hak politik. Ketiga, organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai penghubung antara komunitas minoritas dan institusi politik formal, agar aspirasi lokal dapat diartikulasikan secara lebih efektif dalam struktur partai.

Penelitian ini juga memiliki relevansi kebijakan yang luas, khususnya dalam upaya memperkuat integrasi nasional melalui sistem politik yang lebih inklusif. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan partai nasionalis dalam menjaga stabilitas politik di wilayah multietnis bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan sosial di antara kelompok etnis. Dengan demikian, partisipasi minoritas tidak hanya berfungsi untuk memperluas basis dukungan pemilu, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial dan legitimasi demokrasi.

Ke depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan secara komparatif antara partai-partai nasionalis dan partai berbasis identitas di berbagai daerah multietnis di Indonesia. Pendekatan semacam ini akan memperkaya pemahaman tentang variasi praktik inklusivitas dan efektivitas representasi politik minoritas dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian longitudinal dapat digunakan untuk menilai apakah keterlibatan etnis minoritas dalam partai nasionalis seperti PDIP membawa dampak jangka panjang terhadap transformasi struktur politik lokal dan peningkatan partisipasi politik yang lebih setara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pengaruh empiris terhadap studi politik lokal Indonesia, tetapi juga memperkuat argumen teoritis bahwa keberhasilan demokrasi dalam masyarakat plural tidak cukup diukur dari keberadaan keragaman etnis dalam institusi politik, melainkan dari kemampuan institusi tersebut menciptakan ruang substantif bagi semua warga negara.

## Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Cahyono, A., & Rahman, A. (2022). Representasi etnis minoritas dalam partai politik lokal di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 23–41.
- Case, W. (2008). *Electoral authoritarianism in Malaysia: Trajectories and lessons*. Routledge.
- Celis, K., & Lovenduski, J. (2018). Power struggles: Gender equality in political representation. *European Journal of Politics and Gender*, 1(1-2), 149–166.
- Chandra, K. (2004). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge University Press.
- Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009). Deepening democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders (Pilkada). *Journal of Contemporary Asia*, 39(2), 187–203.
- Fadiyah, D. (2017) Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dan Konstelasi Politik Etnis Tionghoa. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 2(2):1-19.
- Haris, S. (2016). *Partai, masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto. (2015). Politik identitas di Indonesia: Antara demokrasi dan kekuasaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 189–204.
- Hoon, C. Y. (2010). *Chinese identity in post-Suharto Indonesia: Culture, politics and media*. Sussex Academic Press.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic groups in conflict*. University of California Press.
- Laclau, E. (2000). *Constructing universality*. Verso.
- Lemarchand, R., & Niang, C. (2020). Ethnic politics and representation in West Africa: Between inclusion and instrumentalization. *African Affairs*, 119(474), 413–434.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Milbrath, L. W. (1965). *Partisipasi politik: Bagaimana dan mengapa orang terlibat dalam politik?* Chicago: Rand McNally.
- Mujani, S. (2018). *Partisipasi dan partai politik di Indonesia*. LP3ES.

- Pepinsky, T. (2019). *Piety and public opinion: Understanding Indonesian Islam*. Oxford University Press.
- Pepinsky, T., & Saiful, M. (2021). Identity politics and party competition in post-Reformasi Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 1-26.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Posner, D. N. (2005). *Institutions and ethnic politics in Africa*. Cambridge University Press.
- Rahmat, Y., & Taufiq, A. (2013). Etnis Tionghoa dan Politik: Studi Kasus Elit Etnis Tionghoa Dalam Kepengurusan Partai Politik PDI-P dan Gerindra Di Kota Semarang Periode 2009-2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 436-445.
- Setiawan, I., Tallapessy, A., & Subaharianto, A. (2015). Politik Identitas Etnis Pasca Reformasi: Studi kasus pada komunitas Tengger dan Used (Laporan penelitian fundamental tahunan). Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.
- Ufen, A. (2006). Political parties in post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'catch-all' competition. German Institute of Global and Area Studies (GIGA) Working Paper, 37, 1-25.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and populism. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285.